

TNI AL Punya Kapal Selam Baru Alugoro-405 Buatan PT PAL

JAKARTA (IM) - TNI Angkatan Laut (AL) punya alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru kapal selam Alugoro-405. Kapal selam ini dibangun Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui PT PAL Indonesia (Persero) yang bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

Dalam prosesi penandatanganan berita acara serah terima, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut kehadiran Alugoro sebagai tonggak historis pertahanan negara. Untuk pertama kalinya PT PAL berhasil ikut serta dalam produksi kapal selam. "Kita sadari bersama betapa pentingnya pertahanan kita. Kita sedang membangun kemampuan pertahanan kita. Bukan karena kita ingin gagah-gagahan. Bukan karena kita ingin mengancam siapapun. Tidak. Berkali-kali, turun termurun dari pendiri bangsa kita, kita tegaskan

bahwa bangsa Indonesia cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3).

Proses serah terima dilakukan oleh pihak DSME kepada Kemhan di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/3). Kemudian dilanjutkan ke TNI AL dan Komando Armada II (Koarmada II) sebagai penggunanya.

Sebelumnya, Kemhan juga telah menerima kapal selam pertama KRI Nagapasa-403 dan kapal selam kedua KRI Ardadadali-404 yang dibangun DSME. Dengan diterimanya Alugoro ini, terdapat tiga kapal selam buatan DSME dan PT PAL Indonesia yang masuk jajaran alutsista TNI AL.

Menurut Prabowo, saat ini banyak alat pertahanan yang sudah sangat tua dan sudah saantnya diremajakan. Untuk itu, peran industri pertahanan dalam negeri sangat diperlukan. ● han

Harun Masiku yang Masih Berstatus Buronan KPK Dicerai Istrinya

JAKARTA (IM) - Buronan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, Harun Masiku resmi dicerai oleh istrinya bernama Hildawati Jamrin. Hal tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA khusus dengan nomor putusan verstek :238/Pdt.G/2020/Pn Mks.

Penasihat hukum Hildawati, Hari Sakti Zabri mengungkapkan, bahwa gugatan cerai telah didaftarkan pada tanggal 27 Juli 2020 pada Pengadilan Negeri Makassar melalui e Court.

"Sudah putus. Didaftarkan pada 27 Juli 2020, dan diputuskan 16 Maret 2021 pada Pengadilan Negeri Makassar. Dengan putusan ini, Harun Masiku dan klien saya sudah tidak ada hubungan lagi," ujar Hari, Rabu (17/3).

Hari menuturkan dalam proses persidangan, Harun tidak pernah hadir meski telah dipanggil beberapa kali oleh

pengadilan sampai dijatuhkannya putusan perceraian ini dalam persidangan tertutup. "Pengadilan Negeri Makassar telah memanggil Harun Masiku beberapa kali selama proses persidangan," kata Hari.

Hari pun meminta kepada semua pihak untuk menghormati langkah Hildawati itu dan tidak menyangkut patokan kasus Harun Masiku kepada kliennya lagi.

Sekadar informasi, Harun Masiku merupakan Caleg asal PDI Perjuangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulisan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR oleh KPK.

Namun, Harun lolos dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Ia berhasil melarikan diri. Ia telah ditetapkan sebagai buronan KPK pada Januari 2020. Harun juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Hingga kini belum diketahui keberadaan Harun Masiku. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



RDP KEMENKUMHAM DENGAN KOMISI III DPR

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) bersama Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Komjen Pol Andap Budhi Revianto (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja tahun 2020 dan program prioritas tahun 2021 serta tindak lanjut penyelesaian permasalahan terhadap kesimpulan rapat kerja sebelumnya.

Meski Sudah Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Masih Hadiri Rapat DPR

Surat resmi pemecatan Jhoni Allen telah dikirimkan Partai Demokrat ke pimpinan DPR. Kini Partai Demokrat tinggal menunggu surat tersebut diteruskan ke Presiden Jokowi.

JAKARTA (IM) - Partai Demokrat menyindir Jhoni Allen Marbun yang masih menghadiri rapat kerja Komisi V DPR bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Selasa (16/3). Padahal, penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit itu diketahui telah dipecat dari keanggotaan partai berlogo

bintang Mercy tersebut. Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, secara moral dan etika seharusnya Jhoni Allen tidak hadir dalam rapat di Komisi V DPR. "Secara moral dan etika, karena sudah diberhentikan tetap dari keanggotaan Partai

Demokrat, seharusnya Jhoni Allen dalam kondisi status quo, dan tidak hadir. Hanya, secara hukum, dokter hewan Jhoni Allen masih punya hak," kata Herzaky melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (17/3).

Herzaky menuturkan, pihaknya telah memproses pemberhentian Jhoni Allen selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Surat resmi telah dikirimkan partai ke pimpinan DPR RI. Selanjutnya pihaknya tinggal menunggu surat tersebut diteruskan ke Presiden Joko Widodo.

"Karena yang berhak memberhentikan anggota DPR RI secara resmi adalah

Presiden RI, berdasarkan permintaan parpol asalnya," ucapnya.

"Mengingat dokter hewan Jhoni Allen masih menggugat pemecatannya di pengadilan, masih ada waktu selama maksimal 60 hari sebelum diberhentikan dari DPR RI. Setelah itu, masih ada waktu maksimal 30 hari selama proses kasasi," katanya.

Jika nanti keputusan pemberhentian dari Presiden Jokowi sudah keluar, Partai Demokrat sudah siap menyodorkan pengganti Jhoni Al-

len sebagai anggota DPR dari fraksi partai berlogo bintang Mercy itu.

"Masih banyak tugas berat membantu rakyat yang menanti kami. Mengingat kalau berharap pelaksanaan etik dari para pelaku GPK-PD, sangatlah tidak mungkin. Selama ini mereka sudah mempertontonkan secara terang benderang, perilaku yang menafikan etika, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menantang-menantang didukung oknum kekuasaan," tandas Herzaky. ● han

Edhy Prabowo Pilih Andreu sebagai Staf Khusus karena Alasan Politis

JAKARTA (IM) - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membeberkan alasan politis di balik pengusulan Andreu Misanta Pribadi untuk menjadi staf khususnya.

Pernyataan ini diungkap Edhy ketika bersaksi untuk terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjo dalam sidang kasus ekspor benih lobster, Rabu (17/3).

"Secara politis, untuk supaya jangan sampai saya sebagai menteri kebetulan dari pasangan 02, jangan seolah-olah mengambil porsi seolah-olah kita semua yang menguasai, makanya saya mengusulkan itu," ungkap Edhy yang bersaksi lewat video conference.

Edhy sendiri merupakan kader Partai Gerindra yang mengusung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Sementara, Andreu merupakan tim sukses dari paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang memenangi pilpres. Di samping alasan politis, Edhy juga mengaku ada alasan lain di balik pemilihan Andreu. "Saya melihat beliau (Andreu) sebagai mantan lulusan SMA terbaik di Indonesia, dan saya pikir punya karakter yang baik," ujar Edhy.

Secara keseluruhan, Edhy mengaku memiliki lima staf khusus kala menjabat sebagai menteri. Selain Andreu, salah satu staf khususnya itu adalah Safri. Edhy mengungkapkan, ia memilih Safri yang juga disebutnya sebagai tim sukses paslon 02 karena sudah lama membantunya. Bahkan, sejak Edhy masih menjadi anggota DPR. "Saudara Safri itu menjadi staf tenaga ahli saya sudah hampir 10 tahun. Jadi saya mencoba mengusulkan dan alasannya karena beliau sudah lama bersama saya," tutur Edhy.

Adapun Edhy menerangkan, staf khusus tersebut diusulkan oleh menteri ke presiden. Apabila presiden sudah menyetujui, orang yang diusulkan baru bisa dilantik sebagai staf khusus.

Sebagai informasi, Edhy, Andreu, serta Safri berstatus sebagai tersangka di kasus ini. Sementara, dalam sidang ini, Suharjo didakwa memberi suap kepada Edhy Prabowo dengan total nilai sebesar 103.000 dollar Amerika Serikat dan Rp 706 juta. Menurut dkkwaan, suap diberikan melalui sejumlah perantara secara bertahap. Suap itu diberikan agar Edhy mempercepat pemberian izin budidaya dan ekspor benih lobster kepada perusahaan Suharjo. ● han

Anggota DPR Sebut KKB Papua Layak Disebut sebagai Teroris

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi setuju bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua disebut sebagai teroris. Hal itu untuk menanggapi wacana redefinisi KKB dan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) di Papua yang upaya menurunkan tensi ketegangan di Papua dan mempertahankan keutuhan NKRI, sehingga kedamaian di tanah Papua akan segera terwujud," katanya berharap.

Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menambahkan, bahwa sampai hari ini belum ada definisi tunggal terhadap kelompok bersenjata di Papua. Polri menggunakan istilah KKB dan TNI menggunakan istilah KSB.

"Jika mengacu pada UU No 5 Tahun 2018, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban

tipit," kata anggota Komisi I. Menurut Politikus Golkar, meredifinisikan KKB dan KSB di Papua merupakan bagian dari upaya penanggulangan aksi kekerasan di Papua secara komprehensif dan terstruktur. "Dengan adanya redefinisi tersebut bisa mempercepat upaya menurunkan tensi ketegangan di Papua dan mempertahankan keutuhan NKRI, sehingga kedamaian di tanah Papua akan segera terwujud," katanya berharap.

Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menambahkan, bahwa sampai hari ini belum ada definisi tunggal terhadap kelompok bersenjata di Papua. Polri menggunakan istilah KKB dan TNI menggunakan istilah KSB.

"Jika mengacu pada UU No 5 Tahun 2018, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban

yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Oleh karena itu, kelompok pengacau di Papua sudah layak di sebut teroris," urainya.

"Harusnya mengatasi kelompok bersenjata tersebut tidak tergantung definisi tetapi demi keselamatan rakyat dan tegaknya NKRI," katanya.

Meski demikian, lanjut Stanislaus, diperlukan aksi komprehensif pemerintah dalam melakukan pendekatan dan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai aspek, dan secara paralel, juga diperlukan aksi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata.

"Jika DPR menjadikan keselamatan rakyat dan tegaknya NKRI sebagai prioritas tentu tidak akan membiarkan persoalan ini terlalu lama menjadi perdebatan," katanya. ● han



SIDANG PERDANA GUGATAN PEMECATAN JHONI ALLEN MARBUN

Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Buyung Dwikora (tengah) memimpin sidang perdana gugatan pemecatan politisi Jhoni Allen Marbun dari Partai Demokrat di PN Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (17/3). Sidang perdana tersebut ditunda hingga minggu depan dikarenakan pihak tergugat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak menghadiri sidang tersebut.

Waspada Buku Nikah Palsu, Begini Cara Kenali yang Asli

JAKARTA (IM) - Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan, buku nikah yang diterbitkan Kemenag telah dilengkapi berbagai pengamanan untuk membedakan antara yang asli dengan yang palsu.

"Buku nikah yang dikeluarkan Kementerian Agama dilengkapi dengan perangkat pengamanan berlapis," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kemenag Kamaruddin Amin dilansir dari laman resmi Kemenag, Rabu (17/3).

Pengamanan berlapis yang dimaksud Kamaruddin di antaranya menggunakan kertas security printing, dan visible ink multi colour. Kemudian, ada pula beberapa bagian yang dicetak timbul dan menggunakan hologram yang sulit dipalsukan.

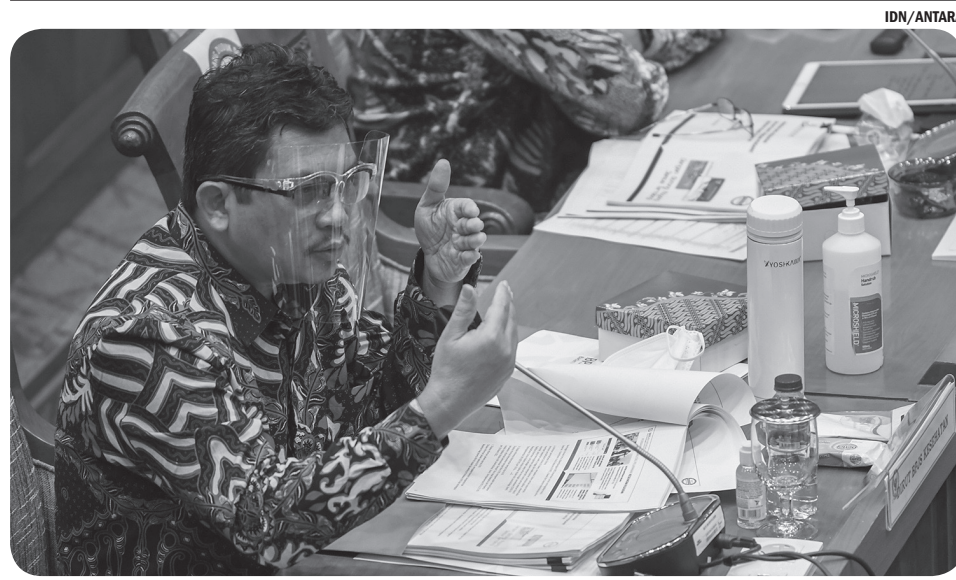
Kamaruddin mengatakan, data nikah yang dicetak dalam buku adalah data yang telah terintegrasi dengan data berbasis e-KITP. Kemudian, pada bagian halaman

tanda tangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat quick response code atau kode QR yang terkoneksi dengan aplikasi Simkah berbasis website.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan keaslian buku nikahnya, dapat melakukan pemindaian pada QR Code yang tertera pada buku nikah.

"Sedangkan bagi masyarakat yang buku nikahnya terbit sebelum tahun 2019, dapat menghubungi petugas resmi KUA untuk dilakukan pengecekan data pencatatan nikah di KUA terkait," ujarnya.

Kamaruddin juga meminta masyarakat untuk langsung datang ke KUA jika ingin mendaftar pernikahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari korban sindikat buku nikah palsu. Ia juga mengimbau pengulu maupun penulih agama yang bertugas di tengah masyarakat agar turut menyosialisasikan pentingnya mengakses layanan langsung ke KUA. ● mei



RDP KEMENKES DENGAN KOMISI IX DPR

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3). Rapat tersebut membahas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan JKN di masa pandemi serta membahas penyelesaian klaim bayi baru lahir dan surplus Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2020.

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT GREENFIELDS INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Malang ("Perseroan"), tanggal 16 Maret 2021, Nomor 48, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng. SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat, para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui:

- Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp. 800.000.000.000,- menjadi Rp. 1.200.000.000.000,- dan modal ditempatkan/diseter Perseroan dari Rp. 612.304.000.000,- menjadi Rp. 1.132.824.000.000,- dengan cara menerbitkan 520.520.000 saham Perseroan atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 520.520.000.000,- yang dilakukan dengan mengkonversi sebagian hutang Perseroan kepada GREENFIELDS DAIRY SINGAPORE PTE LTD, pemegang saham Perseroan sebesar Rp. 520.520.000.000,-.

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 18 Maret 2021
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CIPTA PESONA AUTO (dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Utara, tanggal 15 Maret 2021, nomor 46, yang dibuat dihadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan:

- Menyetujui dan mengesahkan Neraca Akhir Likuidasi Perseroan;
- Menyetujui menerima pertanggungjawaban Likuidator Perseroan;
- Menyetujui memberhentikan dan membubarkan Likuidator Perseroan;
- Menyetujui untuk tidak memberikan honorarium kepada Likuidator Perseroan.

Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan kepada:

Bp. Hanjanto d/a Puri Matari 1 Lantai G
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. H1-H2
Kel. Karet, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan

Jakarta, 18 Maret 2021
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KAISAR MULTI SINERGI (dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Barat, tanggal 15 Maret 2021, nomor 47, yang dibuat dihadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan:

- Menyetujui dan mengesahkan Neraca Akhir Likuidasi Perseroan;
- Menyetujui menerima pertanggungjawaban Likuidator Perseroan;
- Menyetujui memberhentikan dan membubarkan Likuidator Perseroan;
- Menyetujui untuk tidak memberikan honorarium kepada Likuidator Perseroan.

Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan kepada:

Bp. Sigit Wijananto d/a Puri Matari 1 Lantai G
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. H1-H2
Kel. Karet, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan

Jakarta, 18 Maret 2021
Likuidator Perseroan